

**PERANSERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN
PERMUKIMAN DI KELURAHAN 5 ULU PALEMBANG**
*(The Community Participation in Settlement Environment Management at
Kelurahan 5 Ulu Palembang)*

Koriena^{*}, Leksono Probo Subanu^{}, dan Pangestu Subagyo^{***}**

^{*}Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kota Palembang

^{**}Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

^{***}Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Abstrak

Kebutuhan untuk permukiman yang baik dan memadai merupakan salah satu masalah perkotaan yang harus diatasi oleh pemerintah. *Kampung Improvement Program* (KIP) yang berisikan pengembangan infrastruktur pemukiman merupakan jawaban untuk masalah tersebut. Kegunaan KIP adalah untuk memotivasi masyarakat agar dapat menolong dirinya sendiri dalam bentuk partisipasi dalam mengelola lingkungan sekitarnya. Penelitian ini berfokus pada partisipasi masyarakat di Kelurahan 5 Ulu Palembang. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tingkat partisipasi masyarakat dalam KIP di sepanjang sungai, dan mengidentifikasi factor determinan yang mempengaruhi partisipasi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan eksplanasi, dengan menggunakan *proporsional random sampling* dengan unit analisis rumah tangga di 2 wilayah yaitu daerah KIP dan sepanjang sungai. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner, interview, pengamatan lapangan dan data sekunder. Metode statistik multiple regression digunakan untuk mengetahui pengaruh faktor sosial-demografi dan sosio-ekonomik terhadap tingkat partisipasi. Uji *T-test independent sample* dan *Mann-Withey-test* digunakan untuk membedakan partisipasi di 2 wilayah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa; (1) partisipasi di daerah KIP untuk jalan dan drainase cenderung berupa kontribusi tenaga dan uang, sedangkan pengelolaan sampah padat cenderung dalam bentuk uang, sementara di daerah sepanjang sungai hal tersebut cenderung tenaga saja; (2) tingkat partisipasi masyarakat yang tinggal di daerah KIP lebih tinggi dari pada yang ada di sepanjang sungai; (3) faktor sosial-demografi dan sosio-ekonomi menentukan tingkat partisipasi dalam pengelolaan jalan dan drainase, sedangkan faktor kepemilikan rumah dan faktor pendapatan menentukan tingkat partisipasi dalam pengelolaan limbah padat; (4) faktor determinan yang mempengaruhi tingkat partisipasi adalah kepemimpinan formal dan informal, kondisi geografis, infrastruktur KIP, rasa keterasingan, kebutuhan mendesak, keuntungan langsung dalam program KIP.

Kata kunci: partisipasi masyarakat, program KIP

Abstract

The need for good and adequate settlement is one of city problems that must be overcome by the government. Kampung Improvement Program (KIP) that consist of settlement infrastructure development was the answer for this problem. The purpose of KIP was to motivate the people in

order to help themselves as a participation in managing environment surroundings. The research was focused on community participation at Kelurahan 5 Ulu Palembang. It aimed to assess the level of participation in KIP riverside area, and to identify determinant factors that influenced the participation.

The research used an overview method with explanation approach. It utilized proportional random sampling with analysis unit of household in two areas, i.e. KIP and riverside area. Data were collected using questionnaires and interviews, field observations, and secondary data. Statistical methods by means of multiple regressions were applied to find out the influence of social demography and social economic factors towards participation levels. Then T-test independent sample and mann-Withey-test were used to look for participation distinction between two areas of research.

The results show that: (1) the participation in KIP area both of road and drainage tends to be in the form of contribution of both labour and money, while in solid waste management tends to be in the form of money only. While the riverside area, it tends to labour only; (2) the level of community participation who lived in KIP area is higher than that of the riverside area; (3) social demography and social economic factors determined the level of participation in road and drainage management, housing ownership, stay, and income factors determined the level of participation in solid waste management; (4) the determinant factor that influenced the level of participation are formal and informal leadership, geographical condition, KIP infrastructure, feeling isolated, urgent needs, direct advantages in KIP Programs.

Key words: community participation, KIP Programs

I. PENGANTAR

Pemerintah daerah dalam melaksanakan proses penyelenggaraan dan pengelolaan pembangunan di daerah, diharapkan dapat menerapkan bentuk pendekatan partisipasi/peran serta dari masyarakat terhadap proses pembangunan daerah. Menurut Mikkelse (1995), peraserta masyarakat dalam pembangunan bukanlah mobilisasi rakyat dalam pembangunan, akan tetapi adalah kerjasama antara rakyat/masyarakat dengan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, dan membiayai pembangunan.

Salah satu dari program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah adalah Program Perbaikan Kampung (*Kampung Improvement Program* : KIP). Program ini pada dasarnya merupakan program perbaikan fasilitas umum lingkungan termasuk peningkatan kualitas jalan-jalan kampung, pematusan, pengadaan air bersih dan pelayanan sosial yang lebih baik dan dilaksanakan di dalam kota pada daerah dengan masyarakat berpenghasilan rendah.

Palembang sebagai kota metropolitan, merupakan kota tua dengan umur sekitar 1.382 tahun. Seperti kota-kota besar lainnya, Palembang juga memiliki banyak permasalahan perkotaan. Salah satunya adalah permukiman yang tidak layak karena disebabkan prasarana lingkungan permukiman yang tidak memenuhi persyaratan bagi permukiman layak huni. Untuk mengatasi permasalahan di atas, salah satu caranya dengan penerapan KIP. Tahap pertama ditujukan untuk kawasan permukiman kumuh pada tahun 1980/1981 sampai dengan 1982/1983 yang meliputi Kelurahan 13-14 Ilir dan 1 Ulu. Kemudian dilanjutkan lagi tahun 1992/1993 hingga 1994/1993 hingga 1994/1995 di 51 Kelurahan. Salah satu Kelurahan yang mendapatkan bantuan KIP ini adalah: Kelurahan 5 Ulu.

Kelurahan 5 Ulu memiliki luas 284 Ha dan jumlah penduduk 23.685 jiwa. Kondisi secara umum, kawasan permukiman ini cenderung mempunyai kepadatan bangunan tinggi; kumuh dan rawan terjadi kebakaran. Struktur bangunan terdiri dari bangunan

permanen dan semi permanen, bangunan panggung dengan konstruksi lantai dasar berada di atas permukaan air, serta bangunan rakit yang terapung di atas perairan sungai. Kondisi ekonomi, sosial dan budaya penduduk mayoritas golongan ekonomi lemah dengan latar belakang pendidikan serta pengetahuan akan lingkungan sehat cenderung terbatas. Secara keseluruhan kawasan permukiman ini memerlukan perhatian dan penataan dari Pemerintah Kota Palembang khususnya dalam mewujudkan permukiman sehat dan layak huni serta mendukung kehidupan sosial ekonomi penghuninya. Salah satu faktor pendukungnya adalah pembangunan prasarana lingkungan melalui KIP.

Mengingat telah berselang tujuh tahun dari pelaksanaan maka program KIP diharapkan masih berkelanjutan manfaatnya bagi masyarakat setempat. Program KIP juga bertujuan untuk memotivasi masyarakat melakukan swadaya dalam mengelola lingkungan permukiman mereka. Swadaya masyarakat ini diharapkan merupakan bentuk peran serta masyarakat yang timbul karena kesadaran akan pentingnya lingkungan yang sehat di permukiman mereka. Pengelolaan lingkungan permukiman termasuk juga pengelolaan prasarana lingkungan yang ada. Oleh karena itu sangatlah penting untuk melakukan kajian yang lebih mendalam mengenai peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan permukiman mengingat keberadaan permukiman ini dengan segala eksistensinya berperan dalam pemenuhan sebagian kebutuhan akan perumahan penduduk kota yang sehat dan layak huni.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengkaji tingkat dan bentuk peranserta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan permukiman saat ini; (2) mengetahui perbedaan tingkat peranserta masyarakat pada wilayah program KIP dan wilayah pinggiran sungai; dan (3) mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi peranserta

masyarakat dalam pengelolaan lingkungan permukiman.

II. KAJIAN PUSTAKA

Berdasarkan undang-undang dan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah, tujuan dasar dari peranserta masyarakat di Indonesia salah satunya adalah mengikutsertakan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup (Suratmo, 2002 : 157). Peranserta atau partisipasi diterjemahkan dari asal kata *participation*, yang menurut pendapat Pei (dalam Oetomo, 1997 : 4) bahwa peranserta itu adalah ikut serta. Peranserta masyarakat merupakan keterlibatan komunitas setempat secara aktif dalam pengambilan keputusan atau pelaksanaannya terhadap proyek-proyek pembangunan untuk masyarakat.

Rukmana (1993 : 212) berpendapat bahwa semua orang berhak dan wajib berperanserta dalam pengelolaan lingkungan, yang tentu juga meliputi penyediaan, pengoperasian dan pemeliharaan prasarana lingkungan permukiman. Pernyataan ini berarti masyarakat mempunyai hak dan kewajiban berperanserta dalam pengelolaan lingkungan termasuk dalam pengelolaan lingkungan permukiman mereka sendiri.

Menurut Prabatmodjo (1994 : 25), ada beberapa faktor yang mendorong dan menentukan tingkat peranserta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan permukiman, yaitu: (1) peran tokoh formal dan informal dari masyarakat; (2) instruksi pemerintah; (3) kebiasaan warga masyarakat terlibat dalam proses suatu kegiatan; (4) kebutuhan mendesak yang dirasakan penduduk; (5) contoh dari pembangunan sukses yang dilakukan oleh masyarakat lain melalui swadaya; (6) manfaat langsung yang akan diperoleh; (7) pengorbanan yang harus diberikan (uang, tenaga lahan, dll); (8) kekhawatiran akan dikucilkan oleh tokoh masyarakat setempat; (9) insentif dan supervisi; dan (10) kesepakatan warga

masyarakat tentang kebutuhan atau mencapai tujuan.

Pada hakekatnya fungsi prasarana lingkungan adalah untuk melayani dan mendorong terwujudnya lingkungan permukiman dan lingkungan usaha yang optimal sesuai dengan fungsinya. Prasarana lingkungan memegang peranan penting dalam mendukung peningkatan kualitas lingkungan permukiman sehingga dibutuhkan ketersediaan prasarana dasar secara memadai sesuai fungsi dan kebutuhannya.

Dalam pengelolaan prasarana lingkungan permukiman, peranserta anggota masyarakat juga dipengaruhi oleh kepemimpinan. Menurut Gatto (dalam Walgito, 2002) ada empat gaya kepemimpinan, yaitu: (1) gaya direktif; (2) gaya konsultatif; (3) gaya partisipatif; dan (4) gaya *free-rein* atau gaya delegasi.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di Kelurahan 5 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Palembang. Kelurahan ini merupakan salah satu wilayah kumuh di Kota Palembang. Karena itu sejak tahun 1994 mendapatkan bantuan Program KIP dengan salah satu tujuannya untuk memperbaiki kualitas lingkungan permukiman di wilayah ini. Kelurahan 5 Ulu dibagi menjadi dua wilayah penelitian yaitu wilayah mendapatkan program KIP dan wilayah pinggiran sungai. Unit analisis adalah kepala keluarga dan pengambilan sampel dengan cara *proportional random sampling* dengan jumlah 220 responden.

Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer akan diperoleh dari kuesioner dan wawancara tatap muka dengan anggota masyarakat di wilayah pelaksanaan program KIP dan wilayah pinggiran sungai, pemuka/tokoh masyarakat ataupun pihak-pihak yang mengetahui pelaksanaan program di wilayah tersebut. Disamping itu juga, akan

dilaksanakan observasi lapangan untuk mengetahui secara lebih mendalam kondisi wilayah dan kegiatan masyarakat setempat serta keadaan lingkungan permukiman yang ada. Data sekunder diperoleh dengan cara menghimpun data dari beberapa kantor, dinas, serta lembaga yang terkait dengan tujuan penelitian ini. Disamping itu juga akan diperoleh dari dokumentasi untuk mempelajari dan mencatat arsip-arsip, monografi, dan data statistik sebagai bahan untuk menganalisa permasalahan.

Metode penelitian adalah penelitian survei dengan tipe pendekatan penelitian ekspansi. Teknik analisis data adalah teknik analisis statistik dengan menggunakan regresi berganda, uji T sampel independen dan uji Mann-Whitney. Melalui teknik ini diharapkan bisa menjelaskan secara detail dan komprehensif variabel-variabel penelitian yang ada.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk peranserta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan permukiman.

1. Bentuk peranserta masyarakat dalam pengelolaan jalan

Bentuk peranserta dibagi dalam empat kategori peranserta yang merupakan sumbangan dari responden dalam pengelolaan jalan. Pada kedua wilayah penelitian, bentuk peranserta dengan persentase terbesar adalah sumbangan tenaga yaitu untuk wilayah program KIP 80,77% dan wilayah pinggiran sungai 87,23%. Selanjutnya pada kedua wilayah sumbangan terbesar kedua adalah tenaga dan uang dimana wilayah program KIP sebesar 7,69% dan wilayah pinggiran sungai 6,38%.

Bila dilihat pada Tabel 1, hanya sebagian kecil saja responden yang menyumbangkan material dimana untuk wilayah program KIP 4,49% dan wilayah pinggiran sungai 2,13%, sedangkan sumbangan uang 7,05% untuk

Peranserta Masyarakat

wilayah program KIP dan 4,26% untuk wilayah pinggiran sungai.

2. Bentuk peranserta masyarakat dalam pengelolaan drainase

Pada wilayah program KIP, sumbangan terbesar yang diberikan responden dalam pengelolaan drainase adalah tenaga 59,62% kemudian terbesar kedua berupa sumbangan tenaga dan uang (27,56%). Hanya sebagian kecil responden yang menyumbangkan uang (7,69%) dan material (5,13%). Hal sama terjadi pada wilayah pinggiran sungai, sumbangan terbesar berupa tenaga (82,81%) dan sumbangan terbesar kedua berupa tenaga dan uang (7,81%). Sedangkan sumbangan berupa uang dan material saja masing-masing 4,69%. Secara rinci bentuk peranserta responden dalam pengelolaan drainase dapat dilihat pada Tabel 2.

Bila dilihat pada wilayah pinggiran sungai, persentase sumbangan tenaga jauh lebih besar daripada bentuk sumbangan yang lain. Hal ini terkait dengan tingkat pendapatan responden pada wilayah ini yang sebagian besar berpenghasilan rendah.

3. Bentuk peranserta masyarakat dalam pengelolaan sampah

Pada wilayah program KIP, sumbangan terbesar responden dalam pengelolaan sampah berupa uang (72,44%) kemudian berupa tenaga 27,56%. Sedangkan pada wilayah pinggiran sungai merupakan kebalikannya dimana sumbangan terbesar berupa tenaga 95,31% dan sumbangan uang hanya 4,69%.

Tabel 1. Bentuk Peranserta Masyarakat dalam Pengelolaan Jalan

No	Bentuk Peranserta	Program KIP		Pinggiran sungai	
		Frekuensi	Persentase (%)	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Tenaga	126	80,77	41	87,23
2.	Uang	11	7,05	2	4,26
3.	Material	57	4,49	1	2,13
4.	Tenaga dan Uang	12	7,69	3	6,38
		156	100	64	100

Sumber: Hasil pengolahan data survei lapangan, 2003

Tabel 2. Bentuk Peranserta Masyarakat dalam Pengelolaan Drainase

No	Bentuk Peranserta	Program KIP		Pinggiran sungai	
		Frekuensi	Persentase (%)	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Tenaga	93	59,62	53	82,81
2.	Uang	12	7,69	3	4,69
3.	Material	8	5,13	3	4,69
4.	Tenaga dan Uang	43	27,56	5	7,81
		156	100	64	100

Sumber: Hasil pengolahan data survei lapangan, 2003

Hal ini terjadi karena pada wilayah program KIP telah ada sistem pengumpulan sampah secara kolektif. Sistem ini tidak bersifat wajib tetapi tergantung keinginan kepala rumah tangga untuk ikut serta. Sampah pada setiap rumah dikumpulkan atau diambil oleh beberapa petugas pengumpul sampah dengan menggunakan gerobak sampah. Petugas pengumpul sampah mendapatkan upah dari hasil iuran sampah setiap kepala rumah tangga yang menggunakan jasa mereka.

Sedangkan pada wilayah pinggiran sungai, belum ada pengumpulan sampah secara kolektif. Sebagian besar responden masih menggunakan tenaga sendiri untuk mengelola sampahnya. Pengelolaan sampah yang mereka lakukan seperti langsung membuang sampah ke TPS yang ada, membakar sampah di halaman rumah dan bahkan membuang sampah langsung ke sungai atau rawa-rawa yang ada di dekat rumah mereka.

B. Tingkat peranserta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan permukiman.

1. Tingkat peranserta masyarakat dalam pengelolaan jalan

Pada wilayah program KIP, tingkat peranserta anggota masyarakat dalam pengelolaan jalan sebagian besar termasuk kategori sedang yaitu 46,79%, kemudian diikuti kategori tinggi sebesar 28,85% dan kategori rendah 24,36%. Sedangkan pada wilayah pinggiran sungai, tingkat peranserta tertinggi pada kategori rendah sebesar 56,25% kemudian kategori sedang 34,38% dan kategori tinggi hanya 9,38%.

2. Tingkat peranserta masyarakat dalam pengelolaan drainase

Pada wilayah program KIP, tingkat peranserta masyarakat dalam pengelolaan drainase tertinggi pada kategori tinggi 44,23%, kemudian kategori sedang 41,03% dan kategori rendah 14,74%.

Tabel 3. Bentuk Peranserta Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah

No	Bentuk Peranserta	Program KIP		Pinggiran sungai	
		Frekuensi	Persentase (%)	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Tenaga	43	27,56	61	95,31
2.	Uang	113	72,44	3	4,69
		156	100	64	100

Sumber: Hasil pengolahan data survei lapangan, 2003

Tabel 4. Tingkat Peranserta Masyarakat dalam Pengelolaan Jalan

No	Bentuk Peranserta	Program KIP		Pinggiran sungai	
		Frekuensi	Persentase (%)	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Tinggi (3 – 4x)	45	28,85	6	9,38
2.	Sedang (2 x)	73	46,79	22	34,38
3.	Rendah (0 – 1x)	38	24,36	36	56,25
		156	100	64	100

Sumber: Hasil pengolahan data survei lapangan, 2003

Tabel 5. Tingkat Peranserta Masyarakat dalam Pengelolaan Drainase

No	Drainase	Program KIP		Pinggiran sungai	
		Frekuensi	Persentase (%)	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Tinggi (8 - 12x)	68	44,23	0	0,00
2.	Sedang (4 - 7x)	64	41,03	22	34,38
3.	Rendah (0 - 3x)	23	14,74	42	65,63
		156	100	64	100

Sumber: Hasil pengolahan data survei lapangan, 2003

Tabel 6. Tingkat Peranserta Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah

No	Sampah	Program KIP		Pinggiran sungai	
		Frekuensi	Persentase (%)	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Baik	116	74,36	3	4,69
2.	Cukup Baik	26	16,67	19	29,69
3.	Buruk	14	8,97	42	65,63
		156	100	64	100

Sumber: Hasil pengolahan data survei lapangan, 2003

Sementara pada wilayah pinggiran sungai merupakan kebalikannya, dimana tingkat peranserta masyarakatnya hanya pada tingkatan kategori sedang dan rendah. Kategori rendah sebesar 65,63% dan kategori sedang 34,38%.

3. Tingkat peranserta masyarakat dalam pengelolaan sampah

Tingkat peranserta masyarakat pada wilayah program KIP, secara umum masuk dalam kategori baik (74,36%) kemudian kategori cukup baik 16,67% dan kategori buruk 14%. Sedangkan pada wilayah pinggiran sungai, kategori tertinggi pada kategori buruk 65,63%, selanjutnya kategori cukup baik 29,69% dan kategori baik sebesar 4,69%.

C. Analisa komparasi tingkat peranserta masyarakat antara wilayah program KIP dengan wilayah pinggiran sungai.

1. Analisa perbedaan tingkat peranserta masyarakat dalam pengelolaan jalan.

Analisis perbedaan tingkat peranserta menggunakan uji T untuk dua sampel independen (*Independent Sample T Test*) karena kedua sampel tidak berkorelasi dan data yang ada berupa data rasio. Dari tabel 7 dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan antara tingkat peranserta masyarakat pada wilayah program KIP dan wilayah pinggiran sungai dimana 95% *confidence level of the difference lower* = 1,145 dan *upper* = 1,513 menggambarkan bahwa perbedaan tingkat peranserta masyarakat dalam pengelolaan jalan pada wilayah program KIP lebih tinggi dan perbedaannya berkisar antara 1,145 sampai dengan 1,513 kali per tahun.

Tabel 7. Hasil Analisis *Independent Samples T-Test* Perbedaan Tingkat Peranserta dalam Pengelolaan Jalan.

Hasil perhitungan		Equal variances not assumed
Mean	KIP	2.67
	Tidak KIP	1.34
T		14.234
Df		203.382
Sig. (2-tailed)		0.000
Mean difference		1.33
Std.Error Difference		0.093
95% confidence Interval of the Difference	Lower	1.145
	Upper	1.513

Sumber: Hasil analisis SPSS 11.0 for windows.

Tabel 8. Hasil Analisis *Independent Samples T-Test* Perbedaan Tingkat Peranserta dalam Pengelolaan Drainase.

Hasil perhitungan		Equal variances not assumed
Mean	KIP	5.72
	Tidak KIP	3.06
T		16.692
Df		211.265
Sig. (2-tailed)		0.000
Mean difference		2.66
Std.Error Difference		0.159
95% Confidence Interval of the Difference	Lower	2.342
	Upper	2.969

Sumber: Hasil analisis SPSS 11.0 for windows.

2. Analisis perbedaan tingkat peranserta masyarakat dalam pengelolaan drainase.

Analisa perhitungan menggunakan uji T untuk dua sampel independen (*Independent Sample T Test*). Dari Tabel 8, dapat diketahui bahwa tingkat peranserta masyarakat pada wilayah program KIP dan wilayah pinggiran sungai benar-benar berbeda, artinya tingkat peranserta masyarakat dalam pengelolaan

drainase pada wilayah program KIP lebih tinggi daripada tingkat peranserta masyarakat pada pinggiran sungai. *95% confidence level of the difference lower* = 2,342 dan *upper* = 2,969. Nilai-nilai ini hanya menggambarkan bahwa perbedaan tingkat peranserta masyarakat dalam pengelolaan jalan pada wilayah program KIP dan wilayah pinggiran sungai berkisar antara 2,342 sampai dengan 2,969 kali pertahun.

Tabel 9. Hasil Analisis *Mann-Whitney* Perbedaan Tingkat Peranserta dalam Pengelolaan Sampah.

	Sampah
Mann-Whitney U	280.000
Wilcoxon W	2360.000
Z	-12.084
Asymp.sig. (2-tailed)	.000

Sumber: Hasil analisis SPSS 11.0 uji Mann-Whitney

3. Perbedaan tingkat peranserta masyarakat dalam pengelolaan sampah

Analisis perhitungan menggunakan uji Mann-Whitney (Uji data dua sampel tidak berhubungan). Dari hasil proses komputer untuk melihat perbedaan tingkat peranserta masyarakat dalam pengelolaan sampah pada wilayah program KIP dan wilayah pinggiran sungai, dapat dilihat pada Tabel 9.

Dari tabel di atas menjelaskan bahwa terdapat perbedaan tingkat peranserta masyarakat dalam pengelolaan sampah antara wilayah program KIP dengan pinggiran sungai dimana tingkat peranserta pada wilayah program KIP lebih tinggi daripada wilayah pinggiran sungai.

D. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Peranserta Masyarakat

Berdasarkan serangkaian analisis pengaruh variabel bebas terhadap tingkat dan bentuk peranserta anggota masyarakat dalam pengelolaan jalan, drainase dan sampah maka dapat diketahui bahwa faktor-faktor sosial kependudukan (usia, tingkat pendidikan, lama tinggal dan status rumah) dan sosial ekonomi (tingkat pendapatan dan jenis pekerjaan) mempunyai pengaruh yang signifikan (probabilitas < 0,05) walaupun lemah ($r < 0,5$) terhadap tingkat dan bentuk peranserta anggota masyarakat dalam pengelolaan jalan, drainase dan sampah. Koefisien determinasi (R^2) yang menunjukkan kemampuan semua variabel usia, tingkat pendidikan, status rumah, lama

tinggal, tingkat pendapatan dan jenis pekerjaan dalam menjelaskan bentuk dan tingkat peranserta anggota masyarakat berkisar antara 7,2% hingga 48,3%. Hal ini berarti 51,7% hingga 92,8% bentuk dan tingkat peranserta anggota masyarakat dalam pengelolaan jalan, drainase dan sampah akan dijelaskan oleh faktor-faktor yang lain.

Peran aparat kelurahan dan para ketua RT selaku pemimpin formal nampaknya juga memberikan pengaruh yang kuat atas terselenggaranya kerja bakti secara rutin dan memotivasi anggota masyarakat untuk ikut ambil bagian dalam kegiatan tersebut. Prasarana lingkungan sebagai hasil pelaksanaan program KIP, juga mempengaruhi tingkat peranserta anggota masyarakat pada wilayah program KIP. Adanya prasarana berupa jalan ataupun drainase dan kesadaran anggota masyarakat akan pentingnya prasarana tersebut dalam kondisi baik, mendorong anggota masyarakat untuk aktif memelihara dan memperbaikinya demi kepentingan mereka. Atau dengan kata lain, anggota masyarakat pada wilayah program KIP mempunyai prasarana yang akan dipelihara atau diperbaiki. Hal ini berbeda dengan wilayah pinggiran sungai, karena memang tidak banyak prasarana yang akan dipelihara dan diperbaiki menyebabkan rendahnya tingkat peranserta mereka.

Geografi wilayah Kelurahan 5 Ulu yang berada di dekat sungai Musi dan memiliki beberapa anak sungai, menjadikan wilayah ini sangat dipengaruhi pasang surut air sungai. Permukiman pendudukan yang

sebagian berupa daratan dan sebagian di atas rawa-rawa mempengaruhi bentuk dan tingkat peranserta anggota masyarakat dalam pengelolaan lingkungan mereka.

Adanya kesepakatan bersama antara pihak kelurahan dan para ketua RT di Kelurahan 5 Ulu untuk mengadakan kerja bakti setiap satu bulan membuat kerja bakti sebagai sarana peranserta anggota masyarakat menjadi terjadwal dengan baik. Bersamaan dengan itu adanya kebutuhan perlunya kondisi jalan, saluran drainase dan penanganan pembuangan sampah yang baik, mendorong anggota masyarakat untuk berperanserta. Disamping itu kesadaran akan manfaat langsung yang akan diperoleh juga memacu anggota masyarakat untuk berperanserta. Di kalangan anggota masyarakat sendiri kekhawatiran akan dikucilkan apabila tidak ikut berperanserta dalam pengelolaan lingkungan ikut meningkatkan peranserta anggota masyarakat.

V. KESIMPULAN

1. Bentuk peranserta anggota masyarakat wilayah program KIP dalam pengelolaan (perbaikan dan pemeliharaan) jalan dan drainase cenderung berupa sumbangan tenaga dan uang, sedangkan bentuk peranserta anggota masyarakat di wilayah pinggiran sungai cenderung berupa sumbangan tenaga.
2. Dalam penanganan pembuangan sampah, anggota masyarakat di wilayah program KIP lebih memilih menyumbangkan uang daripada tenaga dengan ikut serta dalam penanganan pembuangan sampah secara kolektif yang dikelola pengurus RT. Sementara anggota masyarakat di wilayah pinggiran sungai memilih menyumbangkan tenaga saja. Hal ini terjadi karena di wilayah ini tidak ada penanganan pembuangan sampah secara kolektif yang dikelola pengurus RT.
3. Faktor sosial kependudukan dan sosial ekonomi ternyata mempengaruhi

peranserta anggota masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Usia, tingkat pendidikan, status rumah, lama tinggal, tingkat pendapatan dan jenis pekerjaan mempengaruhi peranserta masyarakat dalam pengelolaan jalan dan drainase. Sedangkan faktor yang mempengaruhi peranserta anggota masyarakat dalam penanganan pembuangan sampah adalah status rumah, lama tinggal dan tingkat pendapatan.

4. Terdapat perbedaan nyata tingkat peranserta anggota masyarakat dalam pengelolaan lingkungan antara wilayah program KIP dan wilayah pinggiran sungai. Tingkat peranserta anggota masyarakat di wilayah program KIP ternyata lebih tinggi daripada wilayah tidak mendapatkan program KIP. Hal ini dilihat dari aktifnya sebagian besar anggota masyarakat di wilayah program KIP untuk ikut serta dalam kegiatan kerja bakti atau gotong-royong dalam perbaikan dan pemeliharaan jalan dan drainase serta dalam penanganan pembuangan sampah.
5. Faktor kepemimpinan formal dan informal, kondisi geografi wilayah penelitian dan prasarana lingkungan hasil program KIP juga mempengaruhi dan memotivasi anggota masyarakat untuk berperanserta dalam pengelolaan lingkungan permukiman mereka. Hal ini berdasarkan adanya perbedaan nyata jumlah prasarana jalan dan drainase, kondisi geografi dan tingkat peranserta anggota masyarakat pada wilayah program KIP dan wilayah pinggiran sungai.

UCAPAN TERIMA KASIH

Disampaikan kepada Pemerintah Kota Palembang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat mengikuti pendidikan di MPKD-UGM. Kepada Bapak Ir. Leksono Probo Subanu.

Peranserta Masyarakat

MURP., Ph.D dan Bapak Drs. Pangestu Subagyo, MBA selaku pembimbing yang telah banyak memberikan masukan dalam penulisan tesis ini. Kepada aparat kelurahan dan masyarakat Kelurahan 5 Ulu yang telah membantu penulisan tesis ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Mikkelsen, Britha. 2001. *Metode Penelitian Partisipatoris*. Edisi Kedua-Juni 2001. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Oetomo, Andi. 1997. *Konsepsi dan Implikasi Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang di Indonesia*. Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, Volume 8, Nomor 2:3 – 15, April 1997, Bandung.
- Prabatmodjo, Hastu dan Dharmapatni, I.A.I. 1994. *Peranserta Masyarakat Berpenghasilan Rendah dalam Pengelolaan Lingkungan Kota*. Bahan Seminar Nasional, Lustrum VII Jurusan Teknik Planologi-ITB, Bandung.
- Rukmana, N., Steinberg, F., dan van der Hoff, R., 1993. *Manajemen Pembangunan Prasarana Perkotaan*. PT. Pustaka LP3ES Indonesia Jakarta.
- Suratmo, F. Gunarwan. 2002. *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Walgito, Bimo. 2002. *Psikologi Sosial (Suatu Pengantar)*. Edisi Ketiga 2002. Andi, Yogyakarta.